

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad.Z. (2021). *Metode Kualitatif* (Rappana.P (ed.); 1st ed.). CV. Syakir Media Press.
- Darmaputra. (2009). *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan* (Yunanto et al. (ed.)). Institute For Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) Press.
- Duria et al. (2009). *Arung Sejarah Bahari IV Provinsi Kepulauan Riau* (Gunawan.R (ed.)). Ajari. [http://repositori.kemdikbud.go.id/12368/1/Arung Sejarah Bahari IV Provinsi Kepulauan Riau.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/12368/1/Arung%20Sejarah%20Bahari%20IV%20Provinsi%20Kepulauan%20Riau.pdf)
- Ginting & Simamora. (2025). *Buku Ajar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar* (Nuraini & Srimawati (ed.); 1st ed.). Metro Press Indonesia.
- Haq & Kaul. (1994). Human Development Report: New Dimension Of Human Security (1994). In *United Nations Development Programme 1994*. United Nations Development Programme (UNDP).
[http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_no stats.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_no_stats.pdf)
- Kennedy. (2021). *Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara Republik Indonesia* (Muvid (ed.); 1st ed.). CV. Global Aksara Pres.
- Koestoro et al. (2021). *Daratan dan Kepulauan Riau dalam Catatan Arkeologi dan Sejarah* (Noerwidi.S (ed.); 1st ed.). PT. Pustaka Obor Indonesia.
- Madu et al. (2010). Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu Permasalahan dan Pilihan Kebijakan. In Nugraha.A (Ed.),
Repository.Unitomo.Ac.Id. Graha Ilmu.
- Rusmiyati et al. (2022). *Manajemen Perbatasan* (Suniarti.S (ed.); 1st ed.). CV.Cendekia Press.
- Sarosa. (2011). *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia* (Partnership Kemitraan (ed.); Issue 2).
- Suacana et al. (2025). *Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan* (Putra (ed.); Vol. 2). CV.

Rey Media Grafika.

Soerjono Soekanto. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar* (ed. i Revis). Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (27th ed.). Alfabeta.

Sururama & Amalia. (2020). *Pengawasan Pemerintahan* (Sonni (ed.)). CV Cendekia Press.

Thahir.B. (2019). Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia. In *Fisip. Untirta*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). <http://fisip.untirta.ac.id>

Zuhro et al. (2024). *Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah* (Mulyani (ed.); 1st ed.). Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

JURNAL

Adellia et al. (2024). Analisis Kebijakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Terhadap Permasalahan *Illegal Fishing* di Wilayah Perbatasan Kepri. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 78–98. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.171>

Aini et al. (2025). Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Asal Kundur Kepulauan Riau. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 363–368.

Anwar et al. (2025). Dinamika Sengketa Internasional: Sengketa Wilayah di Asean. *SliyarJournal*, 5(1), 1–23.

Ardiansyah et al. (2024). Tinjauan Hukum Kolaborasi Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia dalam Penampungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *Journal Of Law and Border Protection*, 6(2), 61–72.

Arman et al. (2024). Penyelesaian Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste dalam Konteks Politik Tata Ruang. *Journal of Law Nation*, 3(4), 887–898.

Farhan et al. (2026). Analisis Program Kerja Sama Regional Sosek Malindo dengan *Human Trafficking* Melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 3(November 2025), 9–17.

- Ghazali.R. (2023). Penanganan Covid-19 di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8, 113–122.
- Gultom et al. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Strategi Geopolitik Di Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Dalam Menghadapi Tentang Sengketa Wilayah Perbatasan. *Adil Indonesia Journal*, 5(2), 136–145.
- Hariarti & Triadi. (2024). Tantangan Penegakan Hukum Pada Tindak Kejahatan Transnasional Di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 9, 175–187.
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/3442>
- Jibran.A. (2021). Non-Traditional Security Threats and Multilateral Response in East Asia. *Asian Journal of International Peace and Security (AJIPS)*, 5(3), 58–65.
- Lindley & Lothian. (2024). Paparan Terhadap Kejahatan Maritim Transnasional di Wilayah Kepulauan Pasifik. *Cogitatio: Ocean & Society*, 1, 1–5.
- Makahingide. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Persoalan Di Wilayah Perbatasan Antara Pulau Marore Dan Philipina Selatan. *Jurnal Politico*, 10(2), 19–37.
- Mose et al. (2024). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Sebagai Upaya Mmepertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002. *Constituendum*, 6(2), 68–78.
- Mourenthino & Ramadhony. (2024). Implementasi Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Dalam Menanggulangi Transaksi Ilegal Di Perbatasan Kalimantan Barat 2019-2024. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(10), 518–541. <https://doi.org/https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>
- Mulyani.S. (2024). Menelusuri Jejak Kebijakan Publik: Tinjauan Literatur Terhadap Penanganan Stunting di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Progress Adminitrasi Publik (JPAP)*, 4(11), 56–64.
- Nurfurqon.A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Yustika*, 23(01), 13–23.
- Oktavianingrum & Widiyarta. (2024). Implementasi Program Penanganan

- Pengaduan Layanan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 316-323.
- Pratiwi. (2020). Keamanan Laut Wilayah Perbatasan Indonesia Sebagai Bentuk Penjagaan Kedaulatan Negara. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 2(1), 129–154. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.122>
- Putri & Chatrine. (2025). Interpretasi Konvensi 1891 dalam Sengketa Perbatasan Laut Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik. *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(3), 1–7.
- Putro et al. (2024). Perjanjian Penyesuaian Kembali Indonesia-Singapura 2022: Ke Mana Arah Kedaulatan Udara, Pertahanan, dan Keamanan Indonesia? *Prophetic Law Review*, 6(3), 168–200.
- Riawan & Akbar. (2024). Transformasi Ekonomi Daerah Kepulauan Riau yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Triple Konsep: Pariwisata, Ekonomi Biru, dan Kerjasama Internasional Indonesia Malaysia Thailand-Growth Triangle (IMT-GT). *Jurnal Archipelago*, 3(01), 29–40. <https://doi.org/10.69853/ja.v3i01.92>
- Sari & Zefri. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21, 311.
- Setiawan.E. (2025). Kerja Sama Bilateral Indonesia-Malaysia Dalam Pengamanan Perbatasan Melalui Patroli Terkoordinasi di Kalimantan Barat Tahun 2023-2024. *Diplomacy And Global Security Journal*, 2(2), 757–773. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4579>
- Silviani & Prayuda. (2023). Analisis Modus Operandi Penyelundupan Narkotika di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun 2017-2020). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 6(1), 42–43.
- Tahir. (2023). Analisis Kinerja Pelayanan Publik pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Archipelago*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.69853/ja.v2i1.19>
- Tupan & Setiorini. (2022). Narrative Review Konten Publikasi Implementasi

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Wilayah Perbatasan. *Shaut Al-Maktabah : Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 14(1), 39–49.
<https://doi.org/10.37108/shaut.v14i1.658>

Utomo & Supriyadi. (2025). Kebijakan Publik dan Pertahanan Nasional dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan: Analisis Strategis Keamanan Nasional. *Jurnal Balitbangda*, 13(2), 159–180. jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/

Yanti et al. (2024). Analisis Kebijakan Publik dalam Penanganan Krisis Kesehatan: Studi Kasus Pandemi Covid-19 di Kabupaten Subang. *Jurnal Studi Administrasi Publik*, 9(1), 11.

Yunita et al. (2024). Analisis Pelanggaran UNCLOS Terhadap Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Ilegal di Kepulauan Riau. *Polsight: Public Knowledge*, 1(2), 159–175. <https://doi.org/10.62771/pk.v1i2.13>

Yusvitasari. (2020). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (September, 2020). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 22–28.

PERATURAN & UNDANG-UNDANG

BPPD. (2021). *Profil Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau*.

BPPD KEPRI. (2022). *Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026*.

Undang-Undang Republik Indonesia 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, 22 (2008).

PerBup Bintan. (2023). *Peraturan Bupati Bintan Nomor 63 Tahun 2023*.

PerGub Kepri. (2023). *Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 (Vol. 2)*